

RENCANA KERJA

[RENJA TAHUN 2019]



PEMERINTAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
DINAS KETAHANAN PANGAN
TAHUN 2018

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian RENSTRA SKPD
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD
- 2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD
- 2.4. Riview terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

- 3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
- 3.3. Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

KATA PENGANTAR

Penyusunan Rancangan Rencana Kerja (Renja) Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2019 berpedoman pada dokumen RPJMD Kabupaten Humbang Hasundutan dan Renstra Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2016-2021, Renja tersebut merupakan penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Renstra, sehingga mampu menggambarkan rencana capaian kinerja tahunan yang memetakan sasaran, indikator dan target.

Dalam upaya pelaksanaan program, dan pencapaian tujuan, sasaran dan strategi yang harus dicapai sesuai dengan Rencana Strategis (Renstra), maka kegiatan Dinas Ketahanan Pangan diprioritaskan kepada masyarakat untuk dapat memenuhi kebutuhan pangannya dengan menggunakan produksi sendiri, yang disebut juga produksi lokal, dimana tujuan akhirnya adalah meminimalkan impor.

Dalam rangka pencapaian tujuan pembangunan Ketahanan Pangan di Kabupaten Humbang Hasundutan, maka disusunlah Rencana Kerja Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2018, sesuai dengan program dan kegiatan yang tercantum dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2019.

Dengan tersusunnya Rencana Kerja SKPD Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2019 ini, diharapkan dapat mengantisipasi dan mengatasi sebagian permasalahan ketahanan pangan secara bertahap.

Doloksanggul, Maret 2018

**Plt. KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN
KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN**



**SABAR SITANGGANG, SP
PEMBINA TK. I
NIP. 19610310 199802 1 001**

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perencanaan pembangunan khususnya urusan Ketahanan Pangan merupakan perencanaan yang terintegrasi dan menyeluruh dari aspek-aspek ketahanan pangan terkait produksi, konsumsi, dan distribusi pangan. Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Humbang Hasundutan, berdasar pada Peraturan Daerah No. 16 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan, merupakan salah satu SKPD pelaksana urusan ketahanan pangan, dimana secara kelembagaan berfungsi untuk mengkoordinasikan pelaksanaan urusan ketahanan pangan, utamanya dalam wadah Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Humbang Hasundutan.

Perencanaan urusan ketahanan pangan dalam periode 2016-2021 bertitik tolak pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2016 -2021, yang kemudian dijabarkan dalam program pembangunan ketahanan pangan selama 5 tahun dalam Renstra SKPD Ketahanan Pangan 2016 - 2021. Rencana Kerja (Renja) Dinas Ketahanan Pangan tahun 2018 merupakan rincian program/kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan di tahun 2018, guna mendukung tercapainya target-target pembangunan ketahanan pangan di Kabupaten Humbang Hasundutan.

1.2 Landasan Hukum

Landasan Hukum Penyusunan Renja Dinas adalah sebagai berikut :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4272);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
9. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4832);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
21. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 65 tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketahanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 nomor 157);
23. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 22);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2016-2021(Lembaran Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2016 Nomor 2);
25. Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan (Lembaran Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 1);

1.3 Maksud dan Tujuan

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Humbang Hasundutan periode Tahun 2019 disusun dengan maksud untuk memberikan arah dan pedoman dalam pembangunan ketahanan pangan di Kabupaten Humbang Hasundutan tahun 2019.

Tujuan disusunnya Renja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Humbang Hasundutan untuk tahun 2019 adalah sebagai berikut :

1. Menjabarkan Visi dan Misi Dinas Ketahanan Pangan, sehingga rencana program pembangunan peningkatan ketahanan pangan, yang telah ditetapkan dapat terwujud sesuai dengan visi dan misi dimaksud, sasaran dan arah kebijakan yang telah ditetapkan;
2. Meningkatkan transparansi dan partisipasi dalam proses perumusan kebijakan, penyusunan program dan pelaksanaan pembangunan ketahanan pangan di Kabupaten Humbang Hasundutan di tahun 2019;
3. Menyelaraskan perencanaan program dengan rencana penganggaran;
4. Terwujudnya penilaian kinerja kebijakan dan program penyelenggaraan urusan ketahanan pangan yang terukur selama tahun 2019.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Kerja (Renja) SKPD Badan Ketahanan Pangan Kabupaten Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2019, disusun dalam sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Berisikan uraian dan gambaran umum penyusunan Rencana Kerja (Renja) SKPD, dan penjelasan tentang latar belakang, dasar hukum, penyusunan, hubungan antar dokumen, sistematika penyusunan Rencana Kerja (Renja) SKPD serta maksud dan tujuan.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

Berisikan uraian tentang hasil evaluasi Renja SKPD tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), kondisi geografi, pencapaian target kinerja berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) SKPD.

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

Berisikan arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional yang terkait dengan tupoksi SKPD, perumusan tujuan dan sasaran berdasarkan isu-isu penting yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra SKPD dan uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Berisikan arah rencana kerja dan pendanaan OPD Ketahanan Pangan tahun 2019.

BAB V PENUTUP

Berisikan kaidah catatan penting yang perlu mendapat perhatian, dalam pelaksanaannya dan harapan dukungan dari seluruh stakeholder untuk terlaksananya kegiatan pembangunan daerah sesuai tupoksi SKPD.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. *Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2017*

Sesuai Dokumen Rencana Kinerja Tahun 2017 pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan ketahanan pangan yang dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Humbang Hasundutan yang pada saat itu masih bergabung dalam Dinas Pertanian merupakan bagian dari upaya untuk mewujudkan salah satu sasaran strategis pembangunan daerah yaitu meningkatnya Ketersediaan dan Ketahanan Pangan daerah.

Tolok ukur keberhasilan dalam mewujudkan sasaran yang telah ditetapkan adalah melalui evaluasi target dan capaian indikator-indikator kinerja urusan ketahanan pangan yaitu :

1. Persentase penguatan ketersediaan dan cadangan pangan daerah;
2. Persentase penanganan kerawanan pangan;
3. Meningkatnya skor pola pangan harapan;
4. Cakupan pengawasan dan pembinaan keamanan pangan
5. Besaran Percepatan penganekaragaman konsumsi pangan;
6. Persentase ketersediaan informasi pasokan, harga, dan akses pangan.

Berikut merupakan rangkuman target dan capaian indikator Kinerja Ketahanan Pangan di tahun 2017 :

	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Ketersediaan pangan pokok	120.000 ton	100.000 ton	90%
2	Ketersediaan energi dan protein	4200 kkal/kap/hr	4200 kkal/kap/hr	100%
3	Penganekaragaman konsumsi pangan	100%	20%	20%
4	Konsumsi energi dan protein	2000 kkal/kap/hr	2000 kkal/kap/hr	100%

Tabel. 2.1
REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA SKPD DAN
PENCAPAIAN RENSTRA SKPD S/D TAHUN 2017
KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN

Nama SKPD : DINAS KETAHANAN PANGAN

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program	Target Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2016-2021	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2016	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan SKPD tahun 2017			Target program / kegiatan (Renja SKPD tahun 2018)	Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan Renstra SKPD s/d tahun 2017				
					Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		realisasi capaian	Tingkat capaian %			
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)*	11=(10/4)*			
	Urusan Wajib												
	Program Peningkatan Ketahanan Pangan												
2	03	19		Kegiatan	Indikator :								
2	03	19	01	Lomba Cipta Menu Pangan B2SA (Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman)	Daftar Menu Makanan B2SA	1 Laporan	0	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	1 Laporan	5,25%
2	03	19	02	Penyusunan Statistik Ketahanan Pangan	Tersedianya data statistik ketahanan pangan	1 Laporan	0	1 laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	1 Laporan	5%
2	03	19	03	Pengembangan pangan pada lokasi pekarangan desa binaan	Jumlah desa binaan mandiri pangan	153 Desa	0	20 Desa	20 Desa	100%	20 Desa	20 Desa	5%
2	03	19	04	Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)	Data ketersediaan pangan dalam bentuk energi dan protein	1 Laporan	0	1 laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	1 Laporan	0,75%

2	03	19	05	Pemantauan analisis akses pangan masyarakat	Terpantaunya bantuan provinsi akan akses pangan masyarakat	153 Desa	0	8 Desa	8 Desa	100%	0	8 DEsa	2%
2	03	19	07	Monitoring bantuan provinsi untuk pengembangan Desa Mandiri Pangan	Tersalurnya bantuan provinsi untuk desa mandiri pangan	153 Desa	0	8 Desa	8 Desa	100%	0	8 Desa	2%
2	03	19	08	Pemantauan dan Analisis Pola Pangan Harapan (PPH)	Tersedianya data aplikasi pola pangan masyarakat	10 Kec	0	10 Kec	3 Kec	100%	100%	3 Kecamatan	0,75%
2	03	19	09	Koordinasi Dewan Ketahanan Pangan	Jumlah Pertemuan dengan Dewan ketahanan Pangan	2 Kali	0	2 Kali	2 Kali	100%	0	2 Kali	0.5%
2	03	19	10	Koordinasi pengembangan kreasi bercocok tanam dengan pembuatan pupuk organik Bio Stater	Terlatihnya masyarakat cara membuat pupuk organik	10 Desa	0	10 Desa	10 Desa	100%	0	10 Desa	2,5%
2	03	19	11	Pengawasan keamanan dan mutu pangan segar	Sertifikat mutu dan keamanan pangan	20 komoditi	0	5 komoditi	5 komoditi	100%	4 komoditit	4 komoditi	1,25%

2	03	19	12	Pendampingan kegiatan pengembangan usaha pangan masyarakat (PUPM)	Terpantaunya usaha pengembangan pangan masyarakat	8 Desa	0	8 Dssa	8 Desa	100%	0	8 Desa	2%
2	03	19	13	Penguatan sistem kewaspadaan pangan dan gizi (SKPG)	Jumlah desa rawan pangan yang didampingi	40 desa	0	4 desa	4 desa	100%	0	4 desa	0
2	03	19	14	Monitoring Ketersediaan dan distribusi pangan	Informasi ketersediaan dan harga pangan strategis	10 kecamatan	0	10 kecamatan	10 kecamatan	100%	2	10 kecamatan	0,5%

Doloksanggul,

2018

Plt. Kepala Dinas Ketahanan Pangan

Kabupaten Humbang Hasundutan



Sabar Sitanggang, SP

Pembina Tk.I

NIP.19610310 199802 1 001

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan OPD Ketahanan Pangan

Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Humbang Hasundutan adalah salah satu SKPD Pelaksana urusan wajib ketahanan pangan di Kabupaten Humbang Hasundutan. Strategi pembangunan dilaksanakan melalui peningkatan ketahanan pangan dari aspek ketersediaan, distribusi, konsumsi dan keamanan pangan yang didasarkan atas 4 (empat) jenis pelayanan dasar bidang ketahanan pangan menurut Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang ketahanan pangan, berdasarkan PERMENTAN No. 65/ Permentan/ OT.140 / 12/10 tentang SPM Bidang Ketahanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota, yaitu :

- pelayanan di bidang ketersediaan dan cadangan pangan,
- distribusi dan akses pangan,
- penganekaragaman dan keamanan pangan, serta
- penanganan kerawanan pangan.

Implementasi standar pelayanan minimal Bidang Ketahanan Pangan di Kabupaten Humbang Hasundutan dijabarkan dalam indikator-indikator kinerja daerah untuk urusan ketahanan pangan, yaitu :

2.2.1. Capaian kinerja

Cakupan kinerja dalam hal ketersediaan pangan yaitu tercapainya minimal Bidang Ketahanan Pangan untuk Kabupaten/Kota (Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia No.65/Permentan/OT.140/12/2010) standar ketersediaan energi minimal adalah 2.200 kkal/hari bagi setiap swasembada pangan khususnya beras dan jagung, hal ini ditunjang oleh program nasional adanya upaya khusus peningkatan produksi padi, jagung dan kedelai (Pajale) energi per kapita mencerminkan jumlah energi dalam satuan kkal yang tersedia setiap hari bagi setiap penduduk di Kabupaten Humbang Hasundutan.

Pencapaian target kinerja ini merupakan sinergi atas berbagai program pembangunan bidang ketahanan pangan, utamanya di sektor produksi pertanian dalam arti luas yang dilaksanakan oleh SKPD-teknis terkait. Upaya-upaya intensifikasi, ekstensifikasi, serta mekanisasi pertanian menjadi pendorong utama peningkatan produksi pangan, yang memacu jumlah produksi pertanian tanaman pangan sebagai sumber pangan pokok (sumber karbohidrat) utama masyarakat Humbang Hasundutan.

Faktor pengendalian pertumbuhan penduduk juga turut menjadi kunci tingkat ketersediaan energi maupun protein, karena pertumbuhan penduduk yang tinggi akan meningkatkan jumlah konsumsi pangan, sedangkan secara umum, tingkat pertumbuhan penduduk dengan peningkatan produksi pangan percepatannya tidak sebanding.

Dinas Ketahanan Pangan di Tahun 2017 turut mendukung pencapaian target kinerja tersebut melalui beberapa kegiatan, antara lain :

- Rapat Koordinasi Dewan Ketahanan Pangan yang mengkoordinasikan program/kegiatan pembangunan di bidang ketahanan pangan di Kabupaten Humbang Hasundutan. Rapat Koordinasi Dewan Ketahanan Pangan ini dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 20 Oktober 2016 dan hari Rabu tanggal 15 Desember 2017 bertempat di Aula Dinas Pertanian Kabupaten Humbang Hasundutan dengan tema : “Menentukan arah dan kebijakan pembangunan kedaulatan pangan di Kabupaten Humbang Hasundutan”

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Dinas Ketahanan Pangan
Kabupaten Humbang Hasundutan

No	Indikator	SPM	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Capaian Analisis
				Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1.	Tingkat ketersediaan pangan utama: - Ketersediaan Energi - Ketersediaan Protein	90%		4150 Kkal/kap/hr 110 Gr/kap/hr	4150 Kkal/kap/hr 110 Gr/kap/hr	4150 Kkal/kap/hr 110 Gr/kap/hr	4150 Kkal/kap/hr 110 Gr/kap/hr	3972 Kkal/kap/hr 91,23 Gr/kap/hr	4150 Kkal/kap/hr 110 Gr/kap/hr	4150 Kkal/kap/hr 110 Gr/kap/hr	4150 Kkal/kap/hr 110 Gr/kap/hr	4150 Kkal/kap/hr 110 Gr/kap/hr
2.	Persentase stabilitas harga dan pasokan pangan pokok (beras)	90%		82%	85%	86%	89%	82%	85%	86%	89%	82%
3.	- Meningkatnya Skor Pola Pangan Harapan (PPH) - Konsumsi Pangan yang B2SA - Konsumsi Energi Konsumsi Protein	80%		2875 Kkal/kap/hr 74 Gr/kap/hr	2985 Kkal/kap/hr 76 Gr/kap/hr	2975 Kkal/kap/hr 78 Gr/kap/hr	2975 Kkal/kap/hr 78 Gr/kap/hr	2225 Kkal/kap/hr 69,8 Gr/kap/hr	1875 Kkal/kap/hr 47 Gr/kap/hr	1875 Kkal/kap/hr 47 Gr/kap/hr	1875 Kkal/kap/hr 47 Gr/kap/hr	1875 Kkal/kap/hr 47 Gr/kap/hr
4.	Berkurangnya kasus keamanan pangan dan daerah rawan pangan	90%		60%	65%	70%	75%	60%	65%	70%	75%	60%

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD

Dinas Ketahanan Pangan di Tahun 2016 belum mendapatkan alokasi anggaran khusus untuk pencapaian target kinerja di bidang keamanan pangan. Pembinaan keamanan pangan dilaksanakan antara lain baru dalam taraf pemberian materi keamanan pangan dalam latihan pengolahan pangan yang dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan, sementara pengawasan yang dilaksanakan dengan monitoring bersama oleh dinas/instansi terkait terhadap pangan yang beredar di masyarakat belum optimal.

Beberapa hambatan mewujudkan ketahanan pangan baik itu ketersediaan, distribusi, diversifikasi dan keamanan pangan di pengaruhi oleh pertumbuhan jumlah penduduk pertahunnya yang mengakibatkan kebutuhan akan meningkat, di beberapa sentra sentra produksi tanaman pangan ada kecenderungan alih fungsi lahan yang produktif. Hasil tersebut menunjukkan masyarakat masih belum sepenuhnya menyadari akan pentingnya keamanan pangan yang kita konsumsi. Tingkat pengetahuan yang kurang akan akibat penggunaan bahan tambahan makanan berbahaya, atau faktor ekonomi untuk menekan biaya produksi dan meraih keuntungan sebesar-besarnya menjadi tantangan yang dihadapi dalam pembinaan keamanan pangan di Kabupaten Humbang Hasundutan.

Adapun isu-isu strategis yang menyangkut tugas pokok dan fungsi adalah :

1. Ketersediaan dan Kerawanan Pangan sistem
 - a. Laju peningkatan produksi pangan cenderung menurun
 - b. Ketergantungan impor/pasokan kedele dari luar masih sangat besar demikian juga dengan daging.
 - c. Belum optimalnya pengelolaan sistem cadangan pangan daerah.
 - d. Belum optimalnya penggunaan lahan pekarangan, lahan tidur dan lahan desa sebagai sumber cadangan pangan masyarakat.
 - e. Belum optimalnya pengelolaan keberadaan lumbung pangan masyarakat dan lembaga cadangan pangan.
 - f. Belum berkembangnya kelembagaan pangan yang mendukung peningkatan ketersediaan cadangan pangan pemerintah daerah untuk mengantisipasi masalah kekurangan pangan di daerah rawan pangan.
 - g. Masih adanya beberapa daerah yang mengalami kerawanan pangan kronis maupun transien.
 - h. Masih adanya penduduk miskin yang berpotensi menimbulkan kerawanan pangan, akibat dari rendahnya ketrampilan, akses permodalan dan lapangan kerja.

2. Distribusi dan Akses Pangan
 - a. Pemasaran bahan pangan masih dikuasai oleh pelaku dagang
 - b. Belum adanya kelembagaan formal yang dibentuk dan dikuasai petani/produsen untuk dapat menguasai harga
 - c. Masih rendahnya harga saat panen raya
 - d. Masih panjangnya rantai pemasaran pangan sehingga menyebabkan peningkatan nilai tambah terhadap produk pangan.
 - e. Masih terjadi gejolak harga bahan pangan terutama menjelang/menghadapi Hari-Hari Besar Keagamaan Nasional.
 - f. Masih adanya tekanan dan gencarnya pasokan produk-produk pangan impor dengan kualitas dan harga yang lebih murah.
3. Konsumsi, Mutu dan Keamanan Pangan
 - a. Masih tingginya ketergantungan masyarakat terhadap konsumsi beras
 - b. Belum optimalnya usaha perubahan perilaku masyarakat terhadap diversifikasi konsumsi pangan dan gizi sejak usia dini.
 - c. Belum berkembangnya teknologi tepat guna dan terjangkau mengenai pengolahan pangan berbasis tepung umbi-umbian lokal dan pengembangan aneka pangan lokal.
 - d. Masih rendahnya citra pangan lokal di masyarakat.
 - e. Masih kurangnya pengetahuan dan kepedulian masyarakat konsumen maupun produsen terhadap keamanan pangan segar maupun olahan.
 - f. Belum efektifnya pengawasan keamanan pangan.

Disamping isu-isu strategis tersebut terdapat beberapa tantangan dan peluang yang mempengaruhi dalam peningkatan pelayanan SKPD sebagai berikut :

a. Tantangan

Tantangan yang dihadapi dalam pengembangan/peningkatan pelayanan SKPD Badan Ketahanan Pangan Kabupaten Deli Serdang, antara lain :

1. Terbatasnya tenaga/sumber daya manusia di Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Humbang Hasundutan.
2. Pertambahan jumlah penduduk
3. Semakin terbatasnya daya dukung sumber daya alam
4. Masih terbatasnya sarana dan prasarana usaha di bidang pangan
5. Semakin ketatnya persaingan pasar dengan produk impor
6. Belum meratanya pengendalian harga gabah di tingkat petani pada saat panen raya.
7. Belum terlaksananya dengan baik diversifikasi produksi dan konsumsi Pangan.

8. Skor pola pangan harapan belum maksimal, sehingga pola konsumsi masyarakat belum ideal;
9. Perilaku masyarakat yang masih bersandarkan pada paradigma “belum makan kalau belum makan nasi” sehingga cenderung sulit untuk merubah pola makan (pangan alternatif yang berasal dari sumber pangan lokal), dalam hal ini karena kebiasaan sejak kecil.
10. Adanya kecenderungan masyarakat mengkonsumsi makanan cepat saji dari bahan impor.
11. Kemampuan produksi dan pelaku usaha pangan di dalam menjamin mutu dan keamanan pangan segar dan olahan yg dihasilkan belum optimal.

b. Peluang

Peluang yang dimiliki pada Badan Ketahanan Pangan Kabupaten Deli Serdang antara lain :

1. Adanya kebijakan pemerintah bahwa ketahanan pangan merupakan urusan wajib.
2. Adanya kebijakan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang dalam hal prinsip partisipasi yaitu melibatkan masyarakat dalam perencanaan, perumusan, implementasi dan evaluasi kebijakan pembangunan di Kabupaten.
3. Tersedianya teknologi budidaya informasi dan komunikasi
4. Adanya kebijakan Nasional Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan (P2KP).
5. Adanya pekarangan masyarakat yang tersedia untuk dilaksanakan penanaman pangan lokal yang berkualitas serta dapat sebagai sumber pangan keluarga dan meningkatkan pendapatan.
6. Adanya harga pembelian pemerintah yang dilaksanakan Bulog, LDPM dan kelompok lumbung masyarakat.
7. Terbentuknya kelompok affinitas yang mendorong peningkatan pendapatan masyarakat.

2.4 Riview terhadap Rancangan Awal RKPD

Rancangan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2018 Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Humbang Hasundutan sudah sesuai dengan program kegiatan Dinas yang di tunjukan pada Renstra Dinas dan diharapkan tingkat pencapaian kinerja sesuai yang di rencanakan. Review terhadap rancangan awal RKPD dapat dilihat pada lampiran sebagai berikut :

Tabel 2.3
Review Terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2018
Kabupaten Humbang Hasundutan

Nama SKPD : Dinas Ketahanan Pangan

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A	BELANJA TIDAK LANGSUNG					BELANJA TIDAK LANGSUNG					
B	BELANJA LANGSUNG					BELANJA LANGSUNG					
	URUSAN WAJIB					URUSAN WAJIB					
	KETAHANAN PANGAN					KETAHANAN PANGAN					
I	Program Peningkatan Ketahanan Pangan					Program Peningkatan Ketahanan Pangan					
1.	Pemberdayaan Gapoktan Penerima Bantuan lumbung pangan masyarakat	Kab. Humbang Hasundutan	Jumlah gapoktan yang memanfaatkan bantuan lumbung pangan	2 kelompok tani	126.502.200	Pemberdayaan Gapoktan Penerima Bantuan Gudang Pangan	Kab. Humbang Hasundutan	Jumlah gapoktan yang memanfaatkan bantuan lumbung pangan	2 kelompok tani	126.502.200	
2.	Pengembangan Desa Mandiri Pangan	Kab. Humbang Hasundutan	Jumlah Desa mandiri pangan	10 Desa	178.421.375	Pengembangan Desa Mandiri Pangan	Kab. Humbang Hasundutan	Jumlah Desa mandiri pangan	10 Desa	178.421.375	
3.	Koordinasi pemantauan harga pangan strategis dalam rangka hari besar keagamaan nasional	Kab. Humbang Hasundutan	Tersedianya informasi harga dan ketersediaan bahan pangan menjelang HBKN	10 kecamatan	38.855.600	Koordinasi pemantauan harga pangan strategis dalam rangka hari besar keagamaan nasional	Kab. Humbang Hasundutan	Tersedianya informasi harga dan ketersediaan bahan pangan menjelang HBKN	10 kecamatan	38.855.600	
4.	Penyusunan peta ketahanan dan kerawanan pangan	Kab. Humbang Hasundutan	Dokumen peta kerawanan pangan	1 dokumen	91.721.000	Penyusunan peta ketahanan dan kerawanan pangan	Kab. Humbang Hasundutan	Dokumen peta kerawanan pangan	1 dokumen	91.721.000	

5.	Monitoring ketersediaan dan distribusi pangan	Kecamatan	Informasi ketersediaan dan harga pangan strategis (kecamatan)	10 kecamatan	40.106.000	Monitoring bidang ketersediaan dan distribusi pangan	Kab. Humbang Hasundutan	Koordinasi kebijakan di bidang ketahanan pangan dalam rangka menuju kedaulatan pangan	10 kecamatan	40.106.000	
6.	Penyusunan neraca bahan manakanan (NBM)	Kab. Humbang Hasundutan	Data ketersediaan pangan dalam bentuk energy dan protein	1 Laporan	77.376.100	Penyusunan dneraca bahan manakanan (NBM)	Kab. Humbang Hasundutan	Data ketersediaan pangan dalam bentuk energy dan protein	1 Laporan	77.376.100	
7.	Pengembangan kawasan rumah pangan lestari (KRPL)	Kab. Humbang Hasundutan	Jumlah kelompok Wanita tani yang mandiri	8 Kwt	175.731.800	Pengembangan kawasan rumah pangan lestari (KRPL)	Kab. Humbang Hasundutan	Jumlah kelompok Wanita tani yang mandiri	8 KWT	175.731.800	
8.	Percepatan diversifikasi pangan	Kab. Humbang Hasundutan	Jumlah jumlah kelompok tani sebagai produsen penganekaragaman pangan kelompok	2 Kelompok tani	125.758.400	Percepatan diversifikasi pangan	Kab. Humbang Hasundutan	Jumlah jumlah kelompok tani sebagai produsen penganekaragaman pangan kelompok	2 Kelompok tani	125.758.400	
9.	Pengawasan keamanan dan mutu pangan segar	Kab. Humbang Hasundutan	Sertifikat mutu dan keamanan pangan	4 Komoditi	98.149.600	Pengawasan keamanan dan mutu pangan segar	Kab. Humbang Hasundutan	Sertifikat mutu dan keamanan pangan	4 komoditi	98.149.600	
10.	Analisa Pola Pangan Harapan (PPH)	Kab. Humbang Hasundutan	Jumlah Analisis Jenis makanan dan jumlah kalori konsumsi keluarga	1 Laporan	92.427.400	Analisa pola dan kebutuhan konsumsi pangan	Kab. Humbang Hasundutan	Jumlah Analisis Jenis makanan dan jumlah kalori konsumsi keluarga	1 laporan	92.427.400	
11.	Lomba cipta menu pangan beragam, bergizi, seimbang dan aman (B2SA)	Kab. Humbang Hasundutan	Daftar Menu Makanan B2SA	1 buku	206.871.000	Lomba ciptamenu pangan beragam, bergizi, seimbang dan aman (B2SA)	Kab. Humbang Hasundutan	Daftar Menu Makanan B2SA	1 buku	206.871.000	
12.	Pengembangan pangan pada lokasi pekarangan desa binaan	Kab. Humbang Hasundutan	Jumlah desa binaan mandiri pangan	60 Desa	292.959.800	Pengembangan pangan pada lokasi pekarangan desa binaan	Kab. Humbang Hasundutan	Jumlah desa binaan mandiri pangan	60 Desa	292.959.800	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Mekanisme penerimaan usulan program/kegiatan dari masyarakat di Dinas Ketahanan Pangan dilaksanakan melalui mekanisme musrenbang dan penerimaan proposal yang langsung ditujukan ke SKPD.

Namun secara kuantitas, proporsi usulan yang masuk lebih banyak melalui pengajuan proposal ke SKPD, dibandingkan pada saat forum musrenbang. Hal ini disebabkan karena kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Humbang Hasundutan lebih banyak merupakan bantuan stimulan, bersifat inisiasi, karena secara struktur kelembagaan, Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Humbang Hasundutan lebih cenderung kepada fungsi koordinatif.

Rincian usulan program dan kegiatan berdasarkan hasil musrenbang pada tahun 2019 tidak ada.

Tabel.2.4
**Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan
(Hasil Musrenbang) Tahun 2019
Kabupaten Humbang Hasundutan**

*Nama SKPD : Dinas Ketahanan
Pangan*

NO	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

3.1.1. Visi Kementerian Pertanian Badan Ketahanan Pangan

Perencanaan pembangunan ketahanan pangan tidak hanya pada peningkatan produktifitas yang tinggi, tetapi juga apakah peningkatan produksi pangan tersebut sudah dapat memperbaiki gizi masyarakatnya. Oleh karena itu perencanaan ketahanan pangan harus bersifat holistik, realistik, kontinyu dan aktual. Konsekuensinya dalam pembuatan perencanaan pangan bukan hanya hasil saja yang harus diperlihatkan, tetapi juga mengenai bagaimana caranya merumuskan pilar ketersediaan dan kerentanan pangan, pilar distribusi pangan dan pilar pola konsumsi dan keamanan pangan dapat berproses dan berjalan secara sinergis.

Sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian Republik Indonesia mempunyai visi 2015 – 2020, yaitu:

“Terwujudnya ketahanan pangan melalui penganekaragaman pangan berbasis sumber daya lokal berlandaskan kedaulatan pangan dan kemandirian pangan”.

3.1.2. Misi Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian

Untuk mencapai visi di atas, Badan Ketahanan Pangan mengemban misi dalam tahun 2015 – 2020, yaitu :

1. Meningkatkan ketersediaan pangan yang beragam berbasis sumber daya lokal.
2. Memantapkan penanganan kerawanan pangan
3. Meningkatkan keterjangkauan pangan masyarakat untuk pangan pokok;
4. Mewujudkan penganekaragaman konsumsi pangan masyarakat berbasis sumber daya, kelembagaan dan budaya lokal.
5. Mewujudkan keamanan pangan segar.

Kebijakan pembangunan ketahanan pangan di tingkat nasional mengikuti Renstra Kementerian periode 2015-2019 lingkup Badan Ketahanan Pangan, sesuai tugas pokok dan fungsinya memiliki 1 (satu) program, yaitu **Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat**, yang mencakup empat kegiatan utama yaitu:

1. Pengembangan Ketersediaan Pangan dan Penanganan Kerawanan Pangan;
2. Pengembangan Sistem Distribusi dan Stabilitas Harga Pangan;
3. Pengembangan Penganekaragaman Konsumsi Pangan dan Peningkatan Keamanan Pangan Segar;
4. Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Badan Ketahanan Pangan.

3.1.3. Visi dan Misi Badan Ketahanan Pangan Provinsi Sumatera Utara

Visi : Terwujudnya ketahanan pangan masyarakat yang berbasis kepada sumber daya lokal yang dimiliki secara efisien dan berkelanjutan menuju masyarakat yang berkualitas dan sejahtera.

Misi :

- o Meningkatkan keberdayaan dan kemandirian masyarakat untuk mewujudkan ketahanan pangan yang berbasis sumber daya lokal yang dimiliki.
- o Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan kesejahteraan masyarakat

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

Tujuan Renja SKPD	:	Sebagai pedoman dalam melaksanakan program dan kegiatan
Sasaran	:	Terwujudnya ketahanan pangan dan kemandirian pangan.
Strategi	:	Melaksanakan ketahanan pangan dari aspek ketersediaan, distribusi, konsumsi dan keamanan pangan
Kebijakan Umum	:	Peningkatan ketersediaan dan cadangan pangan, distribusi dan akses pangan, diversifikasi konsumsi dan keamanan pangan, serta penanganan kerawanan pangan

Arah Kebijakan : Meningkatkan ketersediaan dan cadangan pangan, distribusi dan akses pangan, diversifikasi konsumsi dan keamanan pangan, serta penanganan kerawanan pangan

3.3. Program dan Kegiatan

Program/Kegiatan yang direncanakan untuk dilaksanakan di tahun 2018 didasarkan pada pencapaian visi-misi kepala daerah terpilih, yaitu “*Mewujudkan Humbang Hasundutan Yang Hebat dan Bermentalitas Unggul*”, dimana sesuai tugas dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan yang melaksanakan **Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat**, program ini dilaksanakan dalam kegiatan yaitu, 1. Peningkatan Ketersediaan dan Cadangan Pangan Daerah, , 2. Pengembangan Sistem Distribusi dan Akses Pangan, 3. Pengembangan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Daerah, serta 4. Meningkatnya Penanganan Daerah Rawan Pangan dan Keamanan Pangan, kegiatan-kegiatan ini dilaksanakan guna pendayagunaan potensi ekonomi daerah, utamanya pemanfaatan pangan lokal yang ada di Kabupaten Humbang Hasundutan, serta mendukung pencapaian target standar pelayanan minimal (SPM) urusan Ketahanan Pangan yang diharapkan dicapai di tahun 2016.

Secara terinci, sub program dan kegiatan tahun 2019 adalah sebagai berikut :

1. Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat

- 1.1 Pemberdayaan gapoktan penerima bantuan gudang pangan masyarakat
- 1.2 Pemberdayaan masyarakat mandiri pangan melalui desa mandiri pangan
- 1.3 Koordinasi pemantauan dan evaluasi harga pangan strategis dlam rangka hari besar keagamaan nasional
- 1.4 Pembuatan peta ketahanan Pangan
- 1.5 Pelaksanaan dan Penguatan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG)
- 1.6 Monitoring Gerakan Masyarakat Mandiri Pangan
- 1.7 Pemberdayaan Gerakan Masyarakat Mandiri Pangan melalui Desa Mandiri Pangan (Demapan)
- 1.8 Monitoring dan Pengawasan Kinerja Penggilingan Padi Menunjuang Stok Beras
- 1.9 Pemantauan dan Analisis Pola Pangan Harapan (PPH)

2. Sub Program Pengembangan Sistem Distribusi dan Stabilitas Harga Pangan

- 2.1. Pembentukan Toko Tani Indonesia
- 2.2. Pembangunan Lumbung Pangan masyarakat
- 2.3. Pengembangan Lembaga Usaha Pangan masyarakat (PUPM)
- 2.4. Peningkatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM)
- 2.5. Koordinasi Pemantauan dan Evaluasi Harga Pangan Strategis
- 2.6. Pemantauan Analisis Akses Pangan Pasar
- 2.7. Pemantauan Pasokan, Harga, Distribusi dan Cadangan Pangan
- 2.8. Kajian Jaringan Distribusi Pangan
- 2.9. Diversifikasi usaha dalam meningkatkan akses pangan masyarakat

3. Sub Program Pengembangan Penganekaragaman Konsumsi Pangan dan

Keamanan Pangan.

- 3.1. Pengawasan Keamanan dan Mutu Pangan Segar
- 3.2. Model Pengembangan Pangan Pokok Lokal (MP3L)
- 3.3. Pemberdayaan Pekarangan Pangan
- 3.4. Lomba Cipta Pangan B2SA (Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman)
- 3.5. Pengembangan Pangan pada Lokasi Pekarangan Desa Binaan
- 3.6. Pemberdayaan Kelompok Wanita Tani melalui Pengembangan Kawasan rumah Pangan Lestari (KRPL)
- 3.7. Analisis Pola dan Kebutuhan Konsumsi Pangan
- 3.8. Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan melalui Gerakan Diversifikasi Pangan
- 3.9. Pemantauan Penganekaragaman konsumsi Pangan

4. Sub Program Dukungan manajemen dan Teknis Lainnya Dinas Ketahanan Pangan

- 4.1 Koordinasi Dewan Ketahanan Pangan
- 4.2 Penyusunan Statistik Ketahanan Pangan
- 4.3 Hari Pangan Nusantara

Tabel 3.1
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2019 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2020
KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN

Nama SKPD : Dinas Ketahanan Pangan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
						APBD	APBD PROV	APBN			
							DAK	TP/DEKON			
I	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				453,012,544	453,012,544					498,313,798
1	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah jenis jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang terpenuhi (jasa)	Dinas Ketahanan Pangan	2 Jasa	32,600,400	32,600,400				2	35,860,440
2	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah Dokumen laporan KeuanganPerangkat Daerah (Dokumen)	Dinas Ketahanan Pangan	6 Dokumen	9,080,000	9,080,000				6	9,988,000
3	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	jumlah jenis penyediaan jasa kebersihan kantor yang terpenuhi (jasa)	Dinas Ketahanan Pangan	1 Jasa	25,009,005	25,009,005				1	27,509,906
4	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah penyediaan alat tulis kantor yang terpenuhi (item)	Dinas Ketahanan Pangan	2 Item	20,088,300	20,088,300				2	22,097,130
5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah penyediaan barang cetakan dan penggandaan yang terpenuhi (item)	Dinas Ketahanan Pangan	50 item	9,977,039	9,977,039				50	10,974,743
6	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang terpenuhi (item)	Dinas Ketahanan Pangan	7 item	3,080,000	3,080,000				7	3,388,000
7	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah penyediaan makanan dan minuman yang terpenuhi (kebutuhan)	Dinas Ketahanan Pangan	3 Kebutuhan	14,837,800	14,837,800				3	16,321,580
8	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Jumlah Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah yang terpenuhi (kali)	Luar Daerah	35 Kali	243,240,000	243,240,000				35	267,564,000
9	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi kedalam daerah	Jumlah Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah yang terpenuhi (kali)	Dalam Daerah	272 kali	95,100,000	95,100,000				272	104,610,000
II	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				47,000,000	47,000,000					51,700,000
10	Pemeliharaan rutin /Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung/kantor yang dipelihara (unit)	Dinas Ketahanan Pangan	1 Unit	10,000,000	10,000,000				1	11,000,000

11	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara (unit)	Dinas Ketahanan Pangan	1 Unit	30,000,000	30,000,000				1	33,000,000
12	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah pemeliharaan perlengkapan gedung/kantor (jenis)	Dinas Ketahanan Pangan	4 Jenis	7,000,000	7,000,000				4	7,700,000
III	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				45,000,000	45,000,000					49,500,000
13	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah Aparatur yang mengikuti Diklat/Bimtek (orang)	Dinas Ketahanan Pangan	8 Orang	45,000,000	45,000,000				8	49,500,000
IV	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat				3,344,533,106	3,344,533,106					3,663,632,127
14	Monitoring Ketersediaan dan Distribusi Pangan	Informasi ketersediaan dan harga pangan strategis (Kecamatan)	Kab.Humbang Hasundutan	10 Kec	153,542,900	153,542,900				10 Kec	153,542,900
15	Koordinasi Dewan Ketahanan Pangan	Jumlah Pertemuan dengan Dewan Ketahanan Pangan (Kali)	Kab.Humbang Hasundutan	2 kali	89,449,400	89,449,400				2 kali	98,394,340
16	Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)	Data ketersediaan pangan dalam bentuk energi dan protein (Laporan)	Kab.Humbang Hasundutan	1 Lap	59,980,200	59,980,200				1 Lap	65,978,220
17	Pengembangan desa Mandiri Pangan	Jumlah desa mandiri pangan (desa)	Kab.Humbang Hasundutan	10 Desa	135,981,700	135,981,700				10 Desa	149,579,870
18	Pengawasan Keamanan dan Mutu Pangan Segar	Sertifikat mutu dan keamanan pangan (Komoditi)	Kab.Humbang Hasundutan	4 komoditi	104,932,180	104,932,180				4 komoditi	115,425,398
19	Lomba Cipta Menu Pangan B2SA (Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman)	Daftar Menu Makanan B2SA	Kab.Humbang Hasundutan	1 Dokumen	199,523,099	199,523,099				1 Dokumen	219,475,409
20	Pengembangan Pangan Pada Lokasi Pekarangan Desa Binaan	Jumlah desa binaan mandiri pangan (desa)	Kab.Humbang Hasundutan	20 Desa	256,503,300	256,503,300				20 Desa	282,153,630
21	Pengembangan Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL)	Jumlah Kelompok Wanita Tani mandiri pangan (KWT)	Kab.Humbang Hasundutan	6 kwt	203,220,000	203,220,000				6 kwt	223,542,000

22	Analisis Pola Pangan Harapan (PPH)	Jumlah Analisis Jenis makanan dan jumlah kalori konsumsi keluarga (Laporan)	Kab. Humbang Hasundutan	1 Lap	76,290,267	76,290,267				1 Lap	83,919,294
23	Percepatan Diversifikasi pangan	Jumlah kelompok tani sebagai produsen penganeekaragaman pangan (kelompok)	Kab. Humbang Hasundutan	1 kelompok	82,970,000	82,970,000				1 kelompok	91,267,000
24	Pembinaan Keamanan Makanan Jajanan Anak Sekolah	Jumlah pangan jajanan sekolah yang diawasi (Jenis)	Kab. Humbang Hasundutan	4 jenis	251,423,500	251,423,500				4 jenis	276,565,850
25	Model Pengembangan Pengolahan Pangan Lokal	Jumlah kelompok tani yang dapat mengembangkan pengolahan pangan lokal (Kecamatan)	Kab. Humbang Hasundutan	10 kecamatan	286,027,000	286,027,000				10 kecamatan	314,629,700
26	Pemberdayaan Gapoktan penerima bantuan lumbung pangan masyarakat	Jumlah Gapoktan yang memanfaatkan bantuan lumbung pangan	Kab. Humbang Hasundutan	2 Gapoktan	182,939,700	182,939,700				2 Gapoktan	201,233,670
28	Pembangunan Lumbung Pangan Masyarakat	Jumlah Pembangunan Lumbung Pangan Masyarakat	Kab. Humbang Hasundutan	14 Unit	-	-		2,796,342,390		14 Unit	-
29	Pebaikan Lumbung Pangan Masyarakat	Jumlah Lumbung pangan masyarakat yang diperbaiki	Kab. Humbang Hasundutan	15 unit	-	-		363,689,800		15 unit	-
30	Sarana Pendukung Lumbung Pangan	Jumlah sarana pendukung lumbung pangan	Kab. Humbang Hasundutan	26 unit	-	-		2,230,000,000		26 unit	-
31	Penguatan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi	Jumlah desa rawan pangan yang didampingi (desa)	Kab. Humbang Hasundutan	4 desa	1,261,749,860	1,261,749,860		-		4 desa	1,387,924,846
Jumlah					3,889,545,650	3,889,545,650	-	5,390,032,190	-		4,278,500,215



Pir. KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN
KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN,

SABAR SITANGGANG, SP
PEMBINA TK.I
NIP. 19610310 199802 1 001

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana Kerja Dinas Ketahanan Pangan ini disusun sebagai kerangka acuan pelaksanaan kegiatan Dinas Ketahanan Pangan di tahun 2019. Adapun rangkaian rencana kerja dan pendanaan OPD Ketahanan Pangan akan diuraikan dalam table sebagai berikut :

Tabel 4.2

**RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN**

Nama SKPD : Dinas Ketahanan Pangan

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019						
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana			
						APBD (Rp)	APBD PROV (Rp)	APBN	
DAK (Rp)	TP/DEKON (Rp)								
I	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				453,012,544	453,012,544			
1	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah jenis jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang terpenuhi (jasa)	Dinas Ketahanan Pangan	2 Jasa	32,600,400	32,600,400			
2	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah Dokumen laporan Keuangan Perangkat Daerah (Dokumen)	Dinas Ketahanan Pangan	6 Dokumen	9,080,000	9,080,000			
3	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	jumlah jenis penyediaan jasa kebersihan kantor yang terpenuhi (jasa)	Dinas Ketahanan Pangan	1 Jasa	25,009,005	25,009,005			
4	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah penyediaan alat tulis kantor yang terpenuhi (item)	Dinas Ketahanan Pangan	2 Item	20,088,300	20,088,300			
5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah penyediaan barang cetakan dan penggandaan yang terpenuhi (item)	Dinas Ketahanan Pangan	50 item	9,977,039	9,977,039			
6	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang terpenuhi (item)	Dinas Ketahanan Pangan	7 item	3,080,000	3,080,000			
7	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah penyediaan makanan dan minuman yang terpenuhi (kebutuhan)	Dinas Ketahanan Pangan	3 Kebutuhan	14,837,800	14,837,800			
8	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Jumlah Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah yang terpenuhi	Luar Daerah	35 Kali	243,240,000	243,240,000			
9	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi kedalam daerah	Jumlah Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah yang terpenuhi	Dalam Daerah	272 kali	95,100,000	95,100,000			
II	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				47,000,000	47,000,000			
10	Pemeliharaan rutin /Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung/kantor yang dipelihara (unit)	Dinas Ketahanan Pangan	1 Unit	10,000,000	10,000,000			

11	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara (unit)	Dinas Ketahanan Pangan	1 Unit	30,000,000	30,000,000			
12	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah pemeliharaan perlengkapan gedung/kantor (jenis)	Dinas Ketahanan Pangan	4 Jenis	7,000,000	7,000,000			
III	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				45,000,000	45,000,000			
13	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah Aparatur yang mengikuti Diklat/Bimtek (orang)	Dinas Ketahanan Pangan	8 Orang	45,000,000	45,000,000			
IV	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat				3,344,533,106	3,344,533,106			
14	Monitoring Ketersediaan dan Distribusi Pangan	Informasi ketersediaan dan harga pangan strategis (Kecamatan)	Kab. Humbang Hasundutan	10 Kec	153,542,900	153,542,900			
15	Koordinasi Dewan Ketahanan Pangan	Jumlah Pertemuan dengan Dewan Ketahanan Pangan	Kab. Humbang Hasundutan	2 kali	89,449,400	89,449,400			
16	Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)	Data ketersediaan pangan dalam bentuk energi dan protein	Kab. Humbang Hasundutan	1 Lap	59,980,200	59,980,200			
17	Pengembangan desa Mandiri Pangan	Jumlah desa mandiri pangan (desa)	Kab. Humbang Hasundutan	10 Desa	135,981,700	135,981,700			
18	Pengawasan Keamanan dan Mutu Pangan Segar	Sertifikat mutu dan keamanan pangan	Kab. Humbang Hasundutan	4 komoditi	104,932,180	104,932,180			
19	Lomba Cipta Menu Pangan B2SA (Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman)	Daftar Menu Makanan B2SA	Kab. Humbang Hasundutan	1 Dokumen	199,523,099	199,523,099			
20	Pengembangan Pangan Pada Lokasi Pekarangan Desa Binaan	Jumlah desa binaan mandiri pangan (desa)	Kab. Humbang Hasundutan	20 Desa	256,503,300	256,503,300			
21	Pengembangan Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL)	Jumlah Kelompok Wanita Tani mandiri pangan (KWT)	Kab. Humbang Hasundutan	6 kw	203,220,000	203,220,000			
22	Analisis Pola Pangan Harapan (PPH)	Jumlah Analisis Jenis makanan dan jumlah kalori konsumsi keluarga (Laporan)	Kab. Humbang Hasundutan	1 Lap	76,290,267	76,290,267			
23	Percepatan Diversifikasi pangan	Jumlah kelompok tani sebagai produsen penganekaragaman pangan (kelompok)	Kab. Humbang Hasundutan	1 kelompok	82,970,000	82,970,000			
24	Pembinaan Keamanan Makanan Jajanan Anak Sekolah	Jumlah pangan jajanan sekolah yang diawasi (Jenis)	Kab. Humbang Hasundutan	4 jenis	251,423,500	251,423,500			
25	Model Pengembangan Pengolahan Pangan Lokal	Jumlah kelompok tani yang dapat mengembangkan pengolahan pangan lokal (Kecamatan)	Kab. Humbang Hasundutan	10 kec	286,027,000	286,027,000			
26	Pemberdayaan Gapoktan penerima bantuan lumbung pangan masyarakat	Jumlah Gapoktan yang memanfaatkan bantuan lumbung pangan	Kab. Humbang Hasundutan	2 Gapoktan	182,939,700	182,939,700			
28	Pembangunan Lumbung Pangan Masyarakat	Jumlah Pembangunan Lumbung Pangan Masyarakat	Kab. Humbang Hasundutan	14 Unit	-	-		2,796,342,390	
29	Pebaikan Lumbung Pangan Masyarakat	Jumlah Lumbung pangan masyarakat yang diperbaiki	Kab. Humbang Hasundutan	15 unit	-	-		363,689,800	
30	Sarana Pendukung Lumbung Pangan	Jumlah sarana pendukung lumbung pangan	Kab. Humbang Hasundutan	26 unit	-	-		2,230,000,000	
31	Penguatan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi	Jumlah desa rawan pangan yang didampingi (desa)	Kab. Humbang Hasundutan	4 desa	1,261,749,860	1,261,749,860		-	
Jumlah					3,889,545,650	3,889,545,650	-	5,390,032,190	-

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2019 disusun sebagai kerangka acuan pelaksanaan kegiatan Dinas Ketahanan Pangan di tahun 2019. Penyusunan Renja 2019 ini didasarkan pada Renstra Periode 2017 - 2021 Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Humbang Hasundutan dalam kerangka Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Humbang Hasundutan tahun 2017 - 2021, mendukung visi Kabupaten Humbang Hasundutan yakni “**MEWUJUDKAN HUMBANG HASUNDUTAN YANG HEBAT DAN BERMENTALITAS UNGGUL**”.

Sebagai catatan penting, Renja Dinas Ketahanan Pangan tahun 2019 dalam proses pelaksanaannya disesuaikan dengan kondisi yang ada dan kebutuhan menurut perkembangan situasi wilayah dan menjawab permasalahan yang timbul. Dengan demikian Renja ini bersifat fleksibel dan dinamis, namun tetap berpegang pada peraturan perundangan yang berlaku.

Guna mewujudkan efektivitas pelaksanaan Renja Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2019 dalam rangka pencapaian target kinerja sebagaimana telah ditetapkan, perlu adanya kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. Capaian target kinerja yang telah ditetapkan sebagai sarana untuk mengetahui Pelaksanaan RPJMD Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2017-2021 diarahkan dan dikendalikan langsung oleh Bupati;
2. Seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dengan dukungan seluruh elemen masyarakat termasuk dunia usaha berkewajiban untuk melaksanakan program-program dalam RPJMD Tahun 2017-2021;
3. Dengan berpedoman pada RPJMD Tahun 2017-2021 ini seluruh SKPD berkewajiban untuk menyusun Renstra-SKPD yang memuat visi, misi, tujuan, dan sasaran, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pokok pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam kerangka pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan dalam RPJMD.
4. Penjabaran Renstra SKPD dituangkan dalam Renja SKPD sebagai acuan untuk setiap tahunnya;
5. SKPD berkewajiban menjamin konsistensi antara Renja SKPD dengan Renstra SKPD, serbagaimana konsistensi antara Renstra SKPD dengan RPJMD Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2017-2021;

6. Pada setiap tahun anggaran dilakukan evaluasi terhadap kemajuan pelaksanaan program prioritas yang telah ditetapkan dalam RPJMD dan sebagai bahan pertimbangan dalam pelaksanaan tahun berikutnya. Evaluasi dimaksud dikoordinasikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
7. Apabila dalam periode pelaksanaan RPJMD Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2017-2021 terdapat hal-hal yang di luar kendali (*force majeure*) Pemerintah Daerah, maka kebijakan umum dan program pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam RPJMD dapat ditinjau kembali, hasilnya dikonsultasikan ke DPRD, untuk mendapat pertimbangan lebih lanjut dalam proses pelaksanaannya diikuti dengan peninjauan kembali RENSTRA serta penjabarannya dalam RENJA SKPD.

Diharapkan, dengan berpedoman pada Renja 2019 ini, pelaksanaan pembangunan ketahanan pangan di Kabupaten Humbang Hasundutan dapat lebih terarah untuk mencapai sasaran yang diharapkan, dalam rangkaian pembangunan jangka menengah Kabupaten Humbang Hasundutan 2017-2021.